LOMBA KARYA TULIS

“STRATEGI DAN DAMPAK PELAKSANAAN TARIF 0% ACFTA TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA”

Oleh

MUHAMMAD RIVANDI

0910011311029

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2012

Lembar Pengesahan

Judul Karya Tulis : *STRATEGI DAN DAMPAK PELAKSANAAN TARIF 0% ACFTA
TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA*

Tanggal Pengesahan : 28 Februari 2012

Identitas Penulis :

Nama : MUHAMMAD RIVANDI

NPM : 0910011311029

Fakultas / Jurusan : EKONOMI / AKUNTANSI

Universitas : UNIVERSITAS BUNG HATTA

Padang, 28 Februari 2012

Ketua Jurusan

Penulis

Fivi Anggraini S.E.,M.Si.,Ak

MUHAMMAD RIVANDI

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ekonomi

Antoni, S.E.,M.E.,Phd

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat taufik dan hidayah-Nya sehingga Karya Tulis ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Penulisan Karya Tulis yang berjudul ***“Strategi dan Dampak Pelaksanaan Tarif 0% Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) Dalam Perekonomian Indonesia”*** ini, .

Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan Karya Tulis ini, dikarenakan kemampuan penulis yang terbatas. Namun berkat bantuan dan dorongan mereka, penulis dapat menyelesaikannya. Penulis sangat berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hafrijal Syandri, M.S selaku Rektor Universitas Bung Hatta
2. Bapak Antoni, S.E.,ME.,Phd, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta
3. Ibu Fivi Anggraini, S.E.,M.Si.,Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Bung Hatta
4. Bapak Helmi Ali Akbar, Ir, MP, ME selaku Dosen Pembimbing
5. Orang tua yang telah memberikan bimbingan dan kasih sayangnya kepada penulis yang selalu menyemangati anaknya disaat tidak fokus , dan mereka memberikan arahan dan petunjuk untuk terus semangat
6. Sahabat penulis yang selalu memberikan suport dan dukungannya, dan selalu ada disaat suka dan duka dalam menulis karya tulis ini, mereka insprirasin jiwaku
7. Teman-teman pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi memberikan ide dan petunjuk dalam referensi karya tulis

Penulis berharap dengan penulisan Karya Tulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca umumnya serta semoga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengembangkan dan meningkatkan prestasi di masa yang akan datang.

Padang, 24 Februari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
ABSTRAK.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan.....	3
BAB II LANDASAN TEORI.....	4
A. Teori Perdagangan Internasional.....	4
B. Teori Kebijakan Publik.....	6
C. Teori Policy Learning (Pembelajaran Kebijakan).....	6
BAB III PEMBAHASAN.....	8
A. <i>Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA)</i>.....	8
1. <i>Latar Belakang ACFTA</i>	8
2. Road Map Perjanjian Indonesia dan ACFTA.....	10
3. Kinerja Perdagangan Indonesia – ACFTA.....	11
a. Neraca Perdagangan Indonesia dengan China.....	11
b. Perkembangan Expor dan Impor Indonesia – ACFTA.....	12
c. Tujuan Pembentukan ACFTA.....	12
B. Pelaksanaan Tarif 0%.....	13
a. Tahapan Pelaksanaan Tarif.....	13
b. Cakupan Pos Tarif Industri Manufaktur Dalam BTBMI.....	15
c. Struktur Tarif Bea Masuk Indonesia.....	16
C. ACFTA sebagai Ancaman atau Peluang.....	16

D. Strategi Indonesia dalam menghadapi pelaksanaan Tarif 0% ACFTA terhadap perekonomian Indonesia.....	18
a. Strategi Indonesia	18
b. Solusi Indonesia dalam menghadapi ACFTA.....	20
E. Dampak Pelaksanaan Tarif 0% ACFTA Terhadap Perekonomian Indonesia.....	22
BAB IV BAB PENUTUP.....	24
a. Simpulan.....	24
b. Saran.....	25

DAFTAR PUSTAKA

Curriculum Vite

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Regional ASEAN dan ACFTA.....	9
Tabel 2 Road Map Perjanjian Indonesia dan ACFTA.....	10
Tabel 3 Neraca Perdagangan Indonesia dengan China.....	11
Tabel 4 Perkembangan Expor dan Impor Indonesia – ACFTA.....	12
Tabel 5 Tingkat penurunan tarif menurut EHP.....	13
Tabel 6 Tingkat penurunan tarif menurut Normal track	14
Tabel 7 Tingkat Penurunan tarif menurut Sensitif Track.....	15

ABSTRAK

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong Industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Salah satu Perdagangan Internasional yaitu perdagangan **Indonesia** dengan *Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA)*.

Dalam membentuk ACFTA, para Kepala Negara Anggota ASEAN dan China telah menandatangani *ASEAN-China Comprehensive Economic Cooperation* pada tanggal 6 November 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Sebagai titik awal proses pembentukan ACFTA para Kepala Negara kedua pihak menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the ASEAN and People's Republic of China* di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 November 2002. Protokol perubahan *Framework Agreement* ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2003, di Bali, Indonesia. Protokol perubahan kedua *Framework Agreement* ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2006. Indonesia telah meratifikasi *Framework Agreement ASEAN-China FTA* melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004.

Kebijakan-kebijakan terus dibuat oleh pemerintah dan bekerjasama dengan ACFTA mereka membuat kebijakan penghapusan bea masuk atau tarif menjadi 0% sehingga kedua belah pihak dalam mengeksport produk mereka ke dalam negeri suatu negara dapat bebas tarif masuk, sehingga kedua belah pihak dapat memberikan harga murah kepada konsumen. Pelaksanaan penghapusan tarif dibagi dalam 3 tahapan yaitu Early Harvest Programme (EHP), Normal Track dan Sensitif Track.

Pelaksanaan tarif 0% membuat pemerintah merencanakan strategi dalam mengimbangi produk dalam negeri Indonesia dapat bersaing dengan produk China, sehingga para para Indusri dan UKM dapat berkreasi dan memberikan kualitas terbaik terhadap produk mereka dengan harga yang terjangkau dengan pendapatan masyarakat

Kebijakan-kebijakan yang dibuat pasti mengundang pro dan kontra terhadap kebijakan pelaksanaan tarif 0%, kebijakan tersebut juga mempunyai dampak positif dan negatif terhadap pelaksanaan tarif 0% terhadap perekonomian Indonesia, dampak dari pelaksanaan kebijakan tersebut dirasakan oleh Para Industri dan UKM dalam negeri kalah bersaing dengan produk China, mereka menjual dengan harga murah dan harga produk dalam negeri lumayan mahal.

Pelaksanaan tarif 0% dari kebijakan ACFTA memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia, oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana Strategi dan dampak pelaksanaan Tarif 0% ACFTA terhadap perekonomian Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia selalu menyiapkan cara untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu cara yang ada adalah melakukan perdagangan internasional. Perdagangan internasional terjadi karena kemampuan dan kebutuhan setiap Negara yang menghasilkan produk yang berbeda-beda. Perdagangan Internasional memang memiliki manfaat di satu sisi tapi juga memiliki kerugian di sisi lain. Salah satu contoh perdagangan internasional adalah *Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA)*.

Tahun 2010 lalu merupakan tahun yang menegangkan terhadap perdagangan Indonesia. Hal itu terjadi, karena pemerintah telah memberlakukan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) di Indonesia. ACFTA ini menimbulkan suatu perkembangan baru pada kegiatan perdagangan internasional, terutama pada kawasan Asia Tenggara. Perdagangan Internasional ini termasuk perdagangan bebas, perdagangan bebas yang dimaksud disini adalah perdagangan produk Negara ke Negara lain tanpa bea masuk (Tarif 0%). Sehingga, pasar domestik Indonesia pun mulai berkompetisi dengan China. Hal ini membuat publik berpendapat pro dan kontra. Kalangan yang kontra menilai bahwa Indonesia dalam ACFTA ini merupakan ajang yang tidak diduga-duga, karena kondisi pasar domestik yang masih tertinggal jauh di belakang Cina. Namun sebagian publik lain yang pro terhadap produk kebijakan ini, beragumen bahwa sebenarnya kebijakan ini merupakan langkah strategis yang harus didukung.

Beberapa kalangan menerima pemberlakuan ACFTA sebagai kesempatan, tetapi di sisi lain ada juga yang menolaknya karena dipandang sebagai ancaman. dalam ACFTA, kesempatan atau ancaman ditunjukkan bahwa bagi kalangan penerima, ACFTA dipandang positif karena bisa memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia. **Pertama** Barang dari Luar Negeri banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, **kedua** Produk yang ditawarkan ke konsumen sangat beragam, dan berkualitas dan **ketiga**, Harga yang diberikan sangat murah dan terjangkau oleh masyarakat.

Bila kalangan penerima memandang ACFTA sebagai kesempatan, kalangan yang menolak memandang ACFTA sebagai ancaman dengan berbagai alasan. ACFTA, di antaranya, berpotensi membangkrutkan banyak perusahaan dalam negeri. Bangkrutnya perusahaan dalam negeri merupakan imbas dari membanjirnya produk China yang ditakutkan dan memang sudah terbukti memiliki harga lebih murah. Secara perlahan ketika kelangsungan industri mengalami kebangkrutan maka pekerja lokal pun akan terancam pemutusan hubungan kerja (PHK).

Persaingan Global merupakan momok yang mengerikan bagi para pengusaha industri terutama industri menengah dan kecil. Dengan adanya ACFTA, hal ini menjadi monster yang menyeramkan. Permasalahan ekonomi kerap kali muncul mengenai berbagai pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan meningkat. Maka dari itu, dampak akan perekonomian Indonesia adanya perjanjian AFTA-China harus lebih diperhatikan. Hal ini perlu adanya solusi, pemikiran dan sikap mental yang harus dipersiapkan dalam menghadapi persaingan global ini.

Persaingan untuk menciptakan Produk untuk dapat bersaing dengan Produk Cina , tidak gampang sehingga menimbulkan dampak yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, karena persaingan daya saing atau competitor terhadap produk yang di perdagangkan di Indonesia. Perdagangan bebas Cina masuk ke Indonesia tanpa membayar tarif Bea Cukai, sehingga harga yang ditawarkan ke Indonesia Sangat Murah. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui **Strategi dan Dampak Kebijakan Pelaksanaan tarif 0% ACFTA terhadap Perekonomian Indonesia.**

Penulis sangat tertarik mengangkat judul ini karena penulis menyadari dari kebijakan pemerintah Indonesia banyak membuat perjanjian tertulis dengan sejumlah organisasi di Dunia, khususnya perjanjian **Indonesia** dengan *Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA)*. Setelah membuat kebijakan-kebijakan tersebut dan telah direalisasikan pelaksanaan tarif 0% sejak tahun 2010, Barang dari China keluar masuk dengan bebas ke Indonesia, malahan Membanjiri Produk China di indonesia, sehingga dapat memberikan Dampak terhadap perekonomian Indonesia seperti UKM dan Industri di Indonesia, yang tidak dapat bersaing dengan produk China. Pemerintah Indonesia berusaha mencari solusi dan jalan keluar terhadap masalah ini. Pemerintah Indonesia mengatur Strategi dalam menghadapi daya saing terhadap produk-produk China.

Penulis menyadari produk-produk China sangat banyak dengan beragam jenis, produk yang mereka pasarkan ke Indonesia sangat digemari oleh masyarakat Indonesia, mereka tertarik produk tersebut karena produk yang mereka pasarkan menarik, harga murah dan kualitas bagus, sehingga produk dalam negeri kalah saing dengan produk China, sehingga Para Industri dalam Negeri berusaha mencari jalan keluar untuk dari permasalahan ini. Mereka harus mencari Ide yang kreatif untuk membuat suatu produk yang terbaru dan dapat menarik para konsumen dalam negeri untuk membeli produk dalam negeri yang mempunyai kualitas yang baik.

B. Rumusan masalah

1. Bagaiman Latar belakang Kebijakan perjanjian Indonesia dengan ACFTA?
2. Bagaimana latar belakang pelaksanaan Tarif 0% ?
3. Apakah ACFTA sebagai Ancaman atau Peluang
4. Bagaimana Strategi Indonesia dalam menghadapi pelaksanaan Tarif 0% ACFTA?
5. Bagaimana Dampak pelaksanaan tarif 0% ACFTA terhadap perekonomian Indonesia?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui latar belakang Kebijakan perjanjian Indonesia dengan ACFTA
2. Untuk mengetahui Latar belakang Pelaksanaan Tarif 0%
3. Untuk mengetahui ACFTA sebagai Ancaman atau Peluang
4. Untuk mengetahui Strategi Indonesia dalam menghadapi pelaksanaan Tarif 0% ACFTA
5. Untuk mengetahui Dampak pelaksanaan tarif 0% ACFTA terhadap perekonomian Indonesia

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong Industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional

Menurut Amir M.S., bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut antara lain disebabkan karena adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan, misalnya dengan adanya bea, tarif, atau kuota barang impor. Selain itu, kesulitan lainnya timbul karena adanya perbedaan budaya, bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, dan hukum dalam perdagangan.

1. Model Ricardian

Model Ricardian memfokuskan pada kelebihan komparatif dan mungkin merupakan konsep paling penting dalam teori perdagangan internasional. Dalam Sebuah model Ricardian, negara mengkhususkan dalam memproduksi apa yang mereka paling baik produksi. Tidak seperti model lainnya, rangka kerja model ini memprediksi dimana negara-negara akan menjadi spesialis secara penuh dibandingkan memproduksi bermacam barang komoditas. Juga, model Ricardian tidak secara langsung memasukan faktor pendukung, seperti jumlah relatif dari buruh dan modal dalam negara.

2. Model Heckscher-Ohlin

Model Heckscher-Ohlin dibuat sebagai alternatif dari model Ricardian dan dasar kelebihan komparatif. Mengesampingkan kompleksitasnya yang jauh lebih rumit model ini tidak membuktikan prediksi yang lebih akurat. Bagaimanapun, dari sebuah titik pandangan

teoritis model tersebut tidak memberikan solusi yang elegan dengan memakai mekanisme harga neoklasikal kedalam teori perdagangan internasional.

Teori ini berpendapat bahwa pola dari perdagangan internasional ditentukan oleh perbedaan dalam faktor pendukung. Model ini memperkirakan kalau negara-negara akan mengekspor barang yang membuat penggunaan intensif dari faktor pemenuh kebutuhan dan akan mengimpor barang yang akan menggunakan faktor lokal yang langka secara intensif. Masalah empiris dengan model H-o, dikenal sebagai Pradoks Leontief, yang dibuka dalam uji empiris oleh Wassily Leontief yang menemukan bahwa Amerika Serikat lebih cenderung untuk mengekspor barang buruh intensif dibanding memiliki kecukupan modal dan sebagainya.

3. Faktor Spesifik

Dalam model ini, mobilitas buruh antara industri satu dan yang lain sangatlah mungkin ketika modal tidak bergerak antar industri pada satu masa pendek. Faktor spesifik merujuk ke pemberian yaitu dalam faktor spesifik jangka pendek dari produksi, seperti modal fisik, tidak secara mudah dipindahkan antar industri. Teori mensugestikan jika ada peningkatan dalam harga sebuah barang, pemilik dari faktor produksi spesifik ke barang tersebut akan untuk pada *term* sebenarnya. Sebagai tambahan, pemilik dari faktor produksi spesifik berlawanan (seperti buruh dan modal) cenderung memiliki agenda bertolak belakang ketika melobi untuk pengendalian atas imigrasi buruh. Hubungan sebaliknya, kedua pemilik keuntungan bagi pemodal dan buruh dalam kenyataan membentuk sebuah peningkatan dalam pemenuhan modal. Model ini ideal untuk industri tertentu. Model ini cocok untuk memahami distribusi pendapatan tetapi tidak untuk menentukan pola perdagangan

4. Model Gravitasi

Model gravitasi perdagangan menyajikan sebuah analisis yang lebih empiris dari pola perdagangan dibanding model yang lebih teoritis diatas. Model gravitasi, pada bentuk dasarnya, menerka perdagangan berdasarkan jarak antar negara dan interaksi antar negara dalam ukuran ekonominya. Model ini meniru hukum gravitasi Newton yang juga memperhitungkan jarak dan ukuran fisik di antara dua benda. Model ini telah terbukti menjadi kuat secara empiris oleh analisis ekonometri. Faktor lain seperti tingkat pendapatan, hubungan diplomatik, dan kebijakan perdagangan juga dimasukkan dalam versi lebih besar dari model ini.

B. Teori Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan-kegiatan akademisi. Menurut Charles O. Jones istilah kebijakan (*policy term*) digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan, program, keputusan, standard, proposal, dan *grand design*. Sedangkan kebijakan publik menurut Robert Eyestone adalah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Adapun tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut: 1) Tahap penyusunan agenda; 2) tahap formulasi kebijakan; 3) tahap adopsi kebijakan; 4) tahap implementasi kebijakan; 5) tahap implementasi kebijakan; 6) tahap evaluasi kebijakan.

C. Teori *Policy Learning* (Pembelajaran Kebijakan)

Proses dan prospek kebijakan sebenarnya memerlukan pelajaran. Karl Deutsch, menggunakan istilah ini untuk menjelaskan peran *feedback* dalam meningkatkan kapasitas belajar pemerintahan. Hugh Heclo berdasarkan definisi Deutsch melihat bagaimana *policy learning* menuntun munculnya perubahan perilaku yang terefleksi dalam perubahan kebijakan sosial dan munculnya inovasi baru kebijakan memiliki cara kerja yang khas dengan bertumpu pada *model evidence-based policy*. Kalau seringkali evaluasi dilakukan sebagai *exercise* akademik, maka dalam *policy learning* hal itu digeser ke arah pelibatan lebih banyak pihak. Oleh karena itu, ada beberapa persyaratan mendasar yang dibutuhkan dalam melakukan *policy learning* ini, yaitu *willingness* dan *open mindedness approach*.

Cara melakukan *Policy Learning*:

1). ***Spatial-Based Learning*** atau Pembelajaran kebijakan berbasis tempat artinya adalah menarik pelajaran dari kebijakan yang dinilai berhasil di suatu daerah tertentu (konsep *best/smart practices*) supaya bisa diaplikasikan di daerah lain. Aplikasi kebijakan dari satu wilayah ke wilayah lain bisa dilakukan secara penuh (replikatif) atau dimodifikasi terlebih dulu berdasarkan pertimbangan konteks wilayah tersebut.

2). *Time-Based Learning* yaitu pembelajaran kebijakan berbasis waktu maksudnya adalah menarik pelajaran berharga dari pengalaman-pengalaman di masa lampau, entah di tempat yang sama atau justru berbeda sama sekali. Pembelajaran kebijakan di masa lampau ini justru penting sekali, mengingat di masa lampau selalu ada cerita tentang keberhasilan dan kegagalan. Esensinya adalah bagaimana keberhasilan yang pernah diraih bisa diulang lagi, sementara kegagalan-kegagalan yang pernah dialami direfleksikan kemudian dicari solusinya. Poin terpentingnya adalah proses yang terjadi dalam time-based learning ini perlu meminjam metode sejarah dalam rangka merekonstruksi pemaknaan dari peristiwa di masa lampau

Policy Learning meliputi dua tahapan analisis yaitu

1. **Instrumental learning** menarik pelajaran tentang kehandalan intervensi kebijakan atau desain implementasi. Fokus analisis instrumental yaitu pada instrumen-instrumen kebijakan dan desain implementasi. Sehingga hasilnya mengarah pada pemahaman sumber-sumber kegagalan kebijakan, atau perbaikan performance kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. **Social learning** menarik pelajaran tentang konstruksi sosial dari suatu masalah kebijakan. Dimana fokus analisis social learning yaitu mengenai masalah masalah kebijakan, cakupan kebijakan atau pemaknaan ulang tujuan-tujuan kebijakan. Berdasarkan fokus analisisnya maka social learning hasilnya mengarah pada perubahan harapan terhadap pencapaian tujuan-tujuan yang telah dirumuskan, atau perumusan ulang tujuan-tujuan kebijakan..

BAB III

PEMBAHASAN

F. Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA).

1. Latar Belakang ACFTA

Zona Perdagangan Bebas atau Regional Free Trade Area (R-FTA) merupakan perwujudan dari fenomena integrasi ekonomi. R-FTA memunculkan banyak pro dan kontra diantara para ahli ekonomi. R-FTA memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih baik dengan mengeliminasi tarif, sehingga masyarakat memiliki daya beli barang yang lebih tinggi. ASEAN-Cina Free Trade Area (ACFTA) diimplementasikan dengan menghapus dan mereduksi segala penghalang dalam proses perdagangan barang (baik tarif maupun non-tarif), memperbaiki akses ke pasar jasa, peraturan dan regulasi investasi dan juga perbaikan kerja sama ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas ASEAN dan Cina. ACFTA membawa banyak keuntungan, dan juga kerugian bagi negara-negara ASEAN. Pemerintah Indonesia berharap bahwa ACFTA akan membawa hasil yang menggembirakan kedepannya, seperti kesempatan yang lebih luas bagi Indonesia untuk memasuki pasar Cina dengan mendayagunakan tarif yang relatif rendah dan populasi yang besar; meningkatkan kerja sama antar pengusaha di kedua negara melalui pembentukan aliansi strategis; meningkatkan daya beli atas barang-barang Cina dengan penurunan tarif dan biaya; dan meningkatkan kemungkinan transfer teknologi antar pengusaha kedua negara. Semua ekspektasi diatas, lepas dari tercapai atau tidaknya, akan butuh bertahun tahun untuk melihat dampak nyata dari ACFTA.

Perdana Menteri Cina, Zhu Rongji adalah orang yang mengeluarkan ide zona perdagangan bebas antara Cina dan ASEAN pada Cina-ASEAN bulan November tahun 2000. Di bulan Oktober 2001, sebuah kelompok ahli ekonomi dari Cina dan ASEAN mengeluarkan sebuah rekomendasi pembentukan ASEAN-Cina dalam waktu 10 tahun kedepan. Satu bulan kemudian di bulan November 2001, pada Cina-ASEAN, para pemimpin dari negara-negara tersebut memulai negosiasi atas kemungkinan diwujudkannya ide tersebut. Satu tahun kemudian, para pemimpin negara-negara ASEAN dan perdana menteri Cina, Zhu Rongji, menandatangani Perjanjian Kerangka Kerja ACFTA. Perjanjian ini berfungsi sebagai roadmap pembentukan zona perdagangan bebas antara Cina dan ASEAN. Perjanjian ini merumuskan bahwa zona perdagangan bebas harus diselesaikan pada tahun 2015. Perjanjian Kerangka Kerja ACFTA merupakan dokumen yang inovatif bagi negara ASEAN, karena

ASEAN sebagai sebuah organisasi, meski telah menjalin perjanjian perdagangan bebas antar anggotanya, belum pernah membuat perjanjian semacam ini dengan negara non-anggota. Selain itu, Perjanjian Kerangka Kerja ACFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas pertama Cina dengan negara asing. Sejak hadirnya Perjanjian Kerangka Kerja ACFTA, baik Cina dan ASEAN telah memasuki tahap negosiasi perjanjian perdagangan bebas lainnya dengan negara-negara lain.

Dalam membentuk ACFTA, para Kepala Negara Anggota ASEAN dan China telah menandatangani *ASEAN-China Comprehensive Economic Cooperation* pada tanggal 6 November 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Sebagai titik awal proses pembentukan ACFTA para Kepala Negara kedua pihak menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the ASEAN and People's Republic of China* di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 November 2002. Protokol perubahan *Framework Agreement* ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2003, di Bali, Indonesia. Protokol perubahan kedua *Framework Agreement* ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2006. Indonesia telah meratifikasi *Framework Agreement ASEAN-China FTA* melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004

Regional ASEAN dan ACFTA

Tabel 1 data dari W. Poedjiwati, Dyah, Kementrian perindustrian 2010

2. Road Map Perjanjian Indonesia dan ACFTA

No	Tahun	Tgl/Bulan	Isi Perjanjian
1	2002	4 November	Kepala Negara Asean dan China menandatangani kerangka persetujuan Comprehensif Economic Cooperation Phompenh
2	2003	6 Oktober	Menteri Ekonomi Asean dan China menandatangani Protokol perubahan kerangka persetujuan di Bali
3	2004	15 Juni	Indonesia meratifikasi kerangka persetujuan ACFTA melalui Kepres No. 48/2004
		21 Juli	Terbit: <ul style="list-style-type: none"> • SK Menkeu No. 355/KM/01/2004 tentang penetapan tarif BM atas impor barang dalam kerangka Early Harvest Package (EHP) ACFTA • SK Menkeu No. 356/KM/01/2004 tentang penetapan Tarif BM atas impor barang dalam kerangka EHP Bilateral Indonesia-China FTA
4	2005	7 Juni	Terbit: <p>Permenkeu No. 56/PM K.010/2005 tentang penurunan atau penghapusan Tarif BM dalam rangka Normal Track ASEAN-China</p>
5	2006	15 Maret	Terbit: <p>Permenkeu No. 21/PM K.010/2006 Tentang penetapan Tarif BM dalam rangka Normal Track ACFTA tahun 2006</p>
6	2007	6 Februari	Terbit: <ul style="list-style-type: none"> • Permenkeu No. 07.KM K.04/2007 tentang perpanjangan SK Menkeu No. 355/KM/01/2004 • Permenkeu No. 08.KM K.04/2007 tentang perpanjangan SK Menkeu No. 356/KM/01/2004

7	2008	23 Desember	Terbit: Permenkeu No. 235/PM K.011/2008 Tentang Penetapan tarif BM dalam rangka ACFTA
8	2009	29 Januari	Departemen Perindustrian meminta penundaan ACFTA dari tahun 2010 hingga 2012 akibat Krisis
		2 Desember	10 Asosiasi Industri meminta penundaan ACFTA ke DPR
		25 Desember	Dibentuk TIM BERSAMA untuk ACFTA yang dipimpin Menkeu dengan melibatkan Apindo, Kadin, dan Deperindag

Tabel 2 Data dari Ibrahim, dkk, 2010

3. Kinerja Perdagangan Indonesia – ACFTA

a. Neraca Perdagangan Indonesia dengan China

Tabel 3 data dari W. Poedjiwati,Dyah, Kementrian perindustrian 2010

- Pada periode 1999-2007, Indonesia mencatat surplus perdagangan dengan China, tetapi sejak tahun 2008 dan 2009 mengalami defisit.
- Defisit neraca perdagangan tahun 2009 relatif lebih rendah dibanding 2008.

b. Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia – ACFTA

Indonesia - China

(US \$ Juta)

	2005	2006	2007	2008	2009	Tren 2005-2009	Perubahan 2009/2008
Total Ekspor	6,662.35	8,343.57	9,675.51	11,636.50	11,499.33	15.31	-1.18
Total Impor	5,842.86	6,636.90	8,557.88	15,247.17	14,002.17	29.43	-8.17
Neraca Perdagangan	819.49	1,706.68	1,117.64	(3,610.67)	(2,502.84)		
Total Ekspor Non Migas	3,959.76	5,466.61	6,664.10	7,787.17	8,920.08	21.87	14.55
Total Impor Non Migas	4,551.27	5,501.98	7,957.25	14,947.90	13,491.36	37.34	-9.74
Neraca Non Migas	(591.51)	(35.37)	(1,293.15)	(7,160.73)	(4,571.28)		
Total Ekspor Industri Pengolahan Non Migas	3,620.74	4,843.68	5,486.62	6,243.87	6,002.22	13.48	-3.87
Total Impor Industri Pengolahan Non Migas	4,302.76	5,101.98	7,305.95	14,175.96	12,739.07	37.61	-10.14
Neraca Industri Pengolahan Non Migas	(682.02)	(258.30)	(1,819.33)	(7,932.09)	(6,736.85)		

Tabel Diagram 4 :Data dari W. Poedjiwati,Dyah, Kementrian perindustrian 2010

Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia ke China meningkat setiap tahun, sehingga mengakibatkan perdagangan Indonesia meningkat dan dapat bersaing dengan produk China

c. Tujuan Pembentukan ACFTA

1. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota
2. Meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem yang transparan dan untuk mempermudah investasi
3. Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijaksanaan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota
4. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota ASEAN baru (Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam–CLMV)
5. Menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi diantara negara-negara anggota.

G. Pelaksanaan Tarif 0%

a. Tahapan Pelaksanaan Tarif

Berdasarkan Perjanjian, pelaksanaan Tarif dilakukan dalam 3 Tahap

1. Early Harvest Programme (EHP)

EHP adalah suatu program untuk mempercepat implementasi ACFTA dimana tarif Most Favored Nation (MFN) sudah dapat dihapus untuk beberapa kategori komoditas tertentu. MFN adalah status yang diberikan kepada suatu negara oleh negara lain dalam suatu hubungan perdagangan. Status ini memberikan kepada suatu negara keuntungan dalam perlakuan perdagangan dalam bentuk (misalnya) tarif rendah atau kuota impor yang lebih tinggi. Negara dengan status MFN harus memperoleh perlakuan dagang yang sama dari negara pemberi status.

The Technical Committee-Tariff and Related Matters (TC-TRM) membentuk EHP pada tahun 2003. Program ini meliputi pembebasan perdagangan daging, ikan, produk susu dan produk ternak lain, pohon hidup, sayuran, buah dan kacang dari semua bea masuk.

Tingkat penurunan tarif EHP dengan 3 tahap penurunan

No	Tingkat Tarif MFN sebelum (X)	Semua tarif turun Per 1 Januari 2004 yaitu menjadi	Semua Tarif Turun pada 1 Januari 2005	Turun lagi pada 1 Januari 2006
1	$X > 15\%$	10%	5%	0%
2	$5\% < X < 15\%$	5%	0%	0%
3	$X < 5\%$	0%	0%	0%

Tabel 5 Data dari Hutabarat, Budiman, dkk (2007)

Indonesia Telah Meratifikasi EHP melalui Keputusan Menteri Keuangan. Indonesia telah mengeluarkan 2 keputusan yaitu SK Menkeu No. 355/KM/01/2004 tentang penetapan tarif BM atas impor barang dalam kerangka Early Harvest Package (EHP) ACFTA terdiri dari 527 pos tarif dan SK Menkeu No. 356/KM/01/2004 tentang penetapan Tarif BM atas impor barang dalam kerangka EHP Bilateral Indonesia-China FTA , terdiri dari 46 pos

tarif. Tarif bea masuk produk-produk ini akan menjadi 0% pada tahun 2006, baik di Indonesia maupun di China

2. Normal Track

Normal Track adalah program penurunan tarif bea masuk antara ASEAN dan China, yang akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2005 dan diturunkan secara bertahap sehingga menjadi 0% pada tahun 2010 dengan pengecualian sejumlah pos tarif yang dapat diturunkan menjadi 0% pada tahun 2012. Tim Tarif saat ini sedang merumuskan program normal track yang diperkirakan meliputi lebih dari 9.000 pos tarif.

Penurunan tarif menurut Normal track yang dikelompokkan dalam 5 kelompok tarif. Dalam Normal Track dibagi dalam 4 tahapan tingkat penurunan Bea cukai

No	Tingkat Tarif MFN sebelumnya (X)	Semua Tarif turun Per 1 juni 2005 yaitu menjadi	Semua tarif turun pada 2007 menjadi	Turun lagi pada tahun 2009 akan menjadi (5%-0%)	Pada 2010 semua tarif menjadi 0%
1	$X > 20\%$	20%	12%	5%	0%
2	$15\% < X < 20\%$	15%	8%	5%	0%
3	$10\% < X < 10\%$	10%	5%	0%	0%
4	$5\% < X < 10\%$	5%	5%	0%	0%
5	$X < 5\%$	5%	5%	0%	0%

Tabel 6 Data dari Hutabarat, Budiman, dkk (2007)

3. Sensitif Track

Sensitive Track (Normal Sensitive dan Highly Sensitive) adalah program penurunan tarif bea masuk antara ASEAN dan China yang dilakukan lebih lambat dari normal track. Sensitive track digolongkan menjadi 2 yaitu Sensitive List dan Highly Sensitive List. Sesuai kesepakatan, produk yang masuk Sensitive track memiliki tarif maksimum 20% pada tahun 2012 dan diturunkan secara bertahap sehingga menjadi 5% pada tahun 2018. Sedangkan tarif bea masuk produk highly sensitive tidak boleh melebihi 50% pada 1 januari tahun 2015. Program ini dirumuskan bersama-sama dengan Normal Track dan akan ditetapkan dalam satu

paket sebagai implementasi dari agreement on Trade in Goods ASEAN-China FTA yang ditandatangani pada bulan Nopember 2004 di Vientine, Laos.

ASEAN-China FTA jumlah pos tarif untuk Sensitive List dan Highly Sensitive List setiap negara ASEAN-China adalah sebagai mana dalam tabel berikut:

No	Negara	Sensitive List	Highly Sensitive List
1	Brunai Darussalam	66	34
2	Camboja	350	150
3	China	161	100
4	Filipina	267	77
5	Indonesia	349	50
6	Laos	88	30
7	Malaysia	272	96
8	Myanmar	271	0
9	Singapura	1	1
10	Thailand	242	100
11	Vietnam	Ta	Ta

Tabel 7 Data dari Hutabarat, Budiman, dkk (2007)

b. Cakupan Pos Tarif Industri Manufaktur Dalam BTBMI

Dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) tahun 2007 terdapat sebanyak 8.750 pos tarif berdasarkan klasifikasi Harmonised System (HS) 10 digit. Dari jumlah tersebut pos tarif sektor industri manufaktur adalah sebanyak 7.577 pos tarif atau sekitar 87% dari total pos tarif seluruh sektor. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri sangat merasakan dampak dari adanya berbagai kesepakatan FTA

BTBMI 2007 menggambarkan tingkat tarif aplikasi (*applied tariff*) MFN seluruh pos tarif dimana rata – rata tingkat tarifnya pada tahun 2007 sudah sangat rendah yaitu 7%, dibandingkan dengan tingkat rata – rata *bound* tarif Indonesia yang di notifikasi di WTO sebesar 36%.

c. Struktur Tarif Bea Masuk Indonesia

Struktur Tarif bea masuk Indonesia sejak tahun 2004-2008

TBM	T A H U N							
	2004		2006		2007		2008	
	JML PT	%	JML P T	%	JML PT	%	JML P T	%
0%	2334	20.91%	2454	21.96%	2088	23.87%	2092	23.92%
5%	4344	38.91%	4136	37.02%	3586	40.99%	3609	41.27%
7.5%	0	0.00%	80	0.72%	121	1.38%	106	1.21%
10%	1709	15.31%	1695	15.17%	1279	14.62%	1329	15.20%
12.5%			42	0.38%	117	1.34%	189	2.16%
15%	1562	13.99%	1562	13.98%	1143	13.06%	1105	12.64%
20%	306	2.74%	590	5.28%	157	1.79%	79	0.90%
25%	345	3.09%	31	0.28%	33	0.38%	37	0.42%
30%	31	0.28%	64	0.57%	39	0.45%	24	0.27%
>30% :								
35%	24	0.21%	16	0.14%	0	0.00%	0	0.00%
40%	115	1.03%	121	1.08%	50	0.57%	49	0.56%
45%	190	1.70%	190	1.70%	47	0.54%	44	0.50%
50%	11	0.10%	18	0.16%	8	0.09%	21	0.24%
55%					15	0.17%	0	0.00%
60%	18	0.16%	103	0.92%	6	0.07%	0	0.00%
65%	8	0.07%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
70%	16	0.14%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
75%	5	0.04%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
80%	74	0.66%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
90%	6	0.05%	6	0.05%	5	0.06%	5	0.06%
105%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
150%	0	0.00%	48	0.43%	45	0.51%	45	0.51%
170%	48	0.43%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
200%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
(*)	17	0.15%	17	0.15%	10	0.11%	10	0.11%
TOTAL	11163	100.00 %	11173	100.00 %	8749	100.00%	8744	100.00 %
RATA2 BM	9.88%		9.45%		7.81%		7.61%	

Tabel 8 Data dari W. Poedjiwati,Dyah, Kementrian perindustrian 2010

H. ACFTA sebagai Ancaman atau Peluang

Free Trade Agreement (FTA) adalah membuka akses pasar, membuka ekspor dan impor. Ekspor dibuka berarti membuka peluang pasar pada negara lain, dan harga bahan baku impor menjadi lebih murah. Manfaat FTA itu besar, antara lain kegiatan ekonomi dalam negeri meningkat, kegiatan produksi akan lebih efisien, ekspor meningkat, investasi meningkat, dan lapangan kerja terbuka lebih luas.

Sejak ditandatanganinya ACFTA, kinerja perdagangan Indonesia dengan China meningkat tajam, walaupun pada 2 tahun terakhir nilai ekspor Indonesia berada di bawah nilai impornya. Sedangkan nilai ekspor non-migas Indonesia terhadap China sejak ditandatanganinya kerjasama ACFTA berada di bawah nilai impornya dimana pada 2008 dan 2009 memiliki kesenjangan yang cukup besar. Penguasaan pasar seluruh produk dan produk non-migas Indonesia di China terus mengalami peningkatan. Meskipun peningkatan

penguasaan pasar produk non-migas Indonesia di China belum mengalami peningkatan yang tajam atau sebanding dengan penguasaan pasar produk Indonesia secara keseluruhan.

Hal lain yang menguntungkan Indonesia adalah impor barang dari China didominasi oleh barang modal dan bahan baku penolong yang digunakan oleh industri dalam negeri yang selalu meningkat setiap tahunnya. Sedangkan barang konsumsi dari RRT masih sedikit jika dibandingkan nilai barang modal dan bahan baku penolong.

Pemerintah telah memprioritaskan pengawasan dini terhadap industri-industri yang dianggap sensitif terhadap ACFTA. Sejumlah sektor industri yang diwakili sebanyak 30 asosiasi menyatakan bahwa terdapat lebih dari 600 nomor *harmony system* (HS) yang belum siap dan meminta pemerintah c.q. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meninjau kembali. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Kemenperin melaksanakan kajian bersama asosiasi dan KADIN sehingga diketahui sebanyak 228 pos tarif yang belum siap karena berdaya saing lemah. Pemerintah telah mengadakan perundingan dengan China, dan pemerintah China bersedia untuk membantu meningkatkan daya saing industri Indonesia yang lemah.

Untuk menekan ancaman yang muncul seiring dengan pelaksanaan ACFTA tersebut pemerintah juga telah membuat langkah-langkah pengamanan antara lain:

- a. Pertama**, dalam rangka “monitoring transaksi impor” terkait dengan implementasi ACFTA, Kemenperin bersama-sama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan membuat model *early warning system* (EWS) untuk 228 pos tarif yang diusulkan ditunda implementasinya pada ACFTA.
- b. Kedua**, terkait dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap 228 pos tarif tersebut, Kemenperin berencana untuk meningkatkan kapasitas Balai-balai Besar dan Balai Riset dan Standarisasi Industri dengan menambah jumlah dan jenis peralatan yang ada.
- c. Ketiga**, untuk mendorong diterapkannya penggunaan produk dalam negeri secara optimal sebagaimana diamanatkan Keppres 80/2003 dan Inpres 2/2009.

Usaha lain yang dilakukan untuk pengamanan ACFTA, pemerintahan melalui SK Menperin No. 49, 50 dan 102 tahun 2009 melakukan: Perumusan kebijakan, strategi dan program P3DN adalah sosialisasi menyeluruh mengenai P3DN; dan *monitoring*, evaluasi, dan penyelesaian masalah P3DN. Ketiga komponen ini selanjutnya menjadi kelompok kerja yang dikoordinir oleh Sekjen Kemenperin.

Disamping pengamanan dengan tujuan menekan ancaman seminimal mungkin pemerintah melalui Kemenperin telah menyusun langkah-langkah dalam rangka meningkatkan daya saing industri dalam negeri yang akan melibatkan sejumlah instansi pemerintah dan asosiasi. Penguatan industri dalam negeri ini berpedoman kepada Kebijakan Industri Nasional (Perpres 28/2008), dimana selama 5 (lima) tahun ke depan bertujuan untuk memantapkan daya saing basis industri manufaktur yang berkelanjutan (*sustainable*) serta terbangunnya pilar industri andalan masa depan.

Faktor-faktor pendukung yang diperlukan untuk penguatan industri dalam negeri ini antara lain: menghilangkan ekonomi biaya tinggi; perbaikan undang-undang tentang ketenagakerjaan; penyediaan bunga bank yang bersaing dan percepatan utilisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR); penyediaan listrik dan gas yang mencukupi dan bersaing; peningkatan infrastruktur, jalan, pelabuhan dan kawasan; penyediaan insentif untuk investasi serta kegiatan *research and development* (R&D), dan training yang bersaing dengan kawasan; program *link and match* sekolah dan kebutuhan industri; kemudahan dalam mendapatkan izin lokasi, khususnya untuk agro industri pengolahan sumber daya alam lainnya, dll.

I. Strategi Indonesia dalam menghadapi pelaksanaan Tarif 0% ACFTA terhadap perekonomian Indonesia

1. Strategi Indonesia

a. STRATEGI I: Penguatan Daya Saing Global

Penanganan issue domestik, meliputi:

1. Penataan lahan dan kawasan industri
2. Pembenahan infrastruktur dan energi,
3. Pemberian insentif (pajak maupun non pajak lainnya)
4. Membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),
5. Perluasan akses pembiayaan dan pengurangan biaya bunga (KUR, Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, modal ventura, keuangan syariah, anjak piutang, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dsb);
6. Pembenahan sistem logistik;
7. Perbaikan pelayanan publik (NSW, PTSP/SPIPISE dsb)
8. Penyederhanaan peraturan
9. Peningkatan kapasitas ketenagakerjaan

b. STRATEGI II: Pengamanan Pasar Domestik

1. Pengawasan di Border

- a. Meningkatkan pengawasan ketentuan impor dan ekspor dalam pelaksanaan FTA
- b. Menerapkan *Early Warning System* untuk pemantauan dini terhadap kemungkinan terjadinya lonjakan impor
- c. Pengetatan pengawasan penggunaan Surat Keterangan Asal barang (SKA) dari Negara Negara mitra FTA
- d. Pengawasan awal terhadap kepatuhan SNI, Label, Ingridien, kadaluarsa, kesehatan,
- e. lingkungan, security dsb.
- f. Penerapan instrumen perdagangan yang diperbolehkan WTO (*safeguard measures*) terhadap industry yang mengalami kerugian yang serius (*seriously injury*) akibat tekanan impor (import surges)
- g. Penerapan instrumen *anti dumping* dan *countervailing duties* atas importasi yang *unfair*

2. Peredaran barang di pasar Lokal

- a. Task Force pengawasan peredaran barang yang tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen dan industri
- b. Kewajiban penggunaan label dan manual berbahasa Indonesia
- c. Promosi penggunaan produksi dalam negeri
- d. Mengawasi efektivitas promosi penggunaan produksi dalam negeri (Inpres No 2 Tahun 2009) termasuk mempertegas dan memperjelas kewajiban KLDI memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri dalam revisi Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah.

c. STRATEGI III: Penguatan Ekspor

- a. Penguatan peran perwakilan luar negeri (ITPC)
- b. Pengembangan *trading house* (PT Sarinah, PT PPI, SMESCO UKM)
- c. Promosi Pariwisata, Perdagangan dan Investasi (TTI)
- d. Penanggulangan masalah akses pasar dan kasus ekspor
- e. Pengawasan penggunaan SKA Indonesia
- f. Peningkatan peran LPEI dalam mendukung pembiayaan ekspor

g. Optimalisasi *trade financing* (bilateral swap)

2. Solusi Indonesia dalam menghadapi ACFTA

Solusi yang diberikan untuk menghadapi permasalahan yang terjadi yaitu dengan memberikan masukan kepada pemerintah, pelaku usaha, dan juga masyarakat.

a. Pemerintah

1. Mempermudah Birokrasi

Pemerintah diharapkan mempermudah birokrasi dalam hal pendirian usaha dan akses terhadap Bank. Fakta di lapangan membuktikan bahwa para pelaku usaha mengalami kesulitan dalam hal pembukaan usaha dikarenakan birokrasinya yang rumit, yakni harus menempuh berbagai syarat yang diberlakukan oleh para pejabat pemerintah. Hal lain juga terlihat dari rumitnya persyaratan dalam akses kredit terhadap Bank sehingga para pelaku usaha mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, hendaknya pemerintah mempermudah birokrasi khususnya UKM dan Industri .

2. Penggunaan Investasi Tepat Guna

Investasi yang masuk ke Industri di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Namun, Peningkatan investasi ini tidak disertai dengan peningkatan pada volume jumlah produksi dikarenakan penggunaan investasi tidak tepat guna yaitu adanya inefisiensi alokasi .

Investasi hendaknya digunakan lebih efisien dan tepat guna pada sektor industri yang memiliki prospektif yang baik. Investasi yang masuk ke industri TPT Indonesia diharapkan digunakan untuk merestrukturisasi mesin-mesin tua sehingga jumlah produksi meningkat.

3. Peningkatan Infrastruktur

Infrastruktur merupakan hal yang sangat penting bagi roda perekonomian suatu negara. Hal ini dikarenakan infrastruktur menjadi penunjang dalam pelaksanaan industri. Misalnya jalan, pelabuhan, teknologi komunikasi, dan pembangkit listrik. Salah satu masalah yang menjadi persoalan terbesar dalam hal infrastruktur adalah supply dalam tenaga listrik masih rendah dibandingkan dengan negara lain

Peningkatan infrastruktur sebaiknya dilakukan pemerintah guna mendukung kegiatan industri domestik dan UKM. Peningkatan infrastruktur ini dapat dilakukan dengan cara pembuatan jalan baru dan juga penambahan supply dalam tenaga listrik. Pemerintah harus

membuat kebijakan atau cara lain misalnya dengan menambah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sehingga kegiatan produksi dapat berjalan dengan lancar.

b. Para Pelaku Usaha

1. Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan input yang paling penting dalam pelaksanaan kegiatan produksi. Tenaga kerja yang berkualitas akan menghasilkan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan berkualitas dan jumlah produksi meningkat. Upah tenaga kerja Indonesia sangat murah dibandingkan dengan upah negara China. Berdasarkan *United States International Trade Commission* (USITC 2004),

Produktivitas tenaga kerja mengukur jumlah output yang dapat dihasilkan dibandingkan dengan jumlah input yang digunakan. Produktivitas tenaga kerja Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan produktivitas negara China. Untuk mendorong industri dan UKM di Indonesia, sebaiknya para pelaku usaha meningkatkan kualitas tenaga kerja misalnya dengan melakukan pelatihan yang dilakukan secara berkala dan melakukan evaluasi-evaluasi kegiatan.

2. Meningkatkan Produksi dan Inovasi

Produk yang dihasilkan China memiliki harga yang relatif murah. Hal ini menyebabkan kekhawatiran para pelaku usaha dalam menghadapi ACFTA dikarenakan produk dalam negeri kurang efisien sehingga harganya relatif lebih mahal. Oleh karena itu, hendaknya para pelaku usaha mengambil suatu langkah agar dapat bersaing dengan produk yang berasal dari China. Salah satu usulan solusi yang ditawarkan adalah meningkatkan produksi dan adanya inovasi produk. Sesuai dengan teori ekonomi bahwa peningkatan dalam jumlah produksi akan menurunkan biaya produksi sehingga harga produk menjadi murah. Dengan demikian, produk Indonesia dapat bersaing dengan produk China.

Inovasi merupakan langkah agar konsumen tidak jenuh dengan produk yang dihasilkan. Selain meningkatkan produksi, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah dengan adanya inovasi produk yang menampilkan sebuah peningkatan kualitas produk Indonesia, sehingga masyarakat domestik pun tidak beralih kepada produk luar negeri.

3. Meningkatkan Promosi

Promosi yaitu memperkenalkan suatu produk yang mana bisa menarik para konsumen untuk membeli dan menggunakan produk yang ditawarkan. Sehingga akan sangat penting

sebuah promosi untuk tekstil ini, dengan banyaknya cara yang bisa dilakukan untuk memperkenalkan produk asli Indonesia disertai dengan inovasi promosi yang baik serta lebih menekankan pada harus bangga dengan memakai produk negara sendiri. Walaupun pada kenyataannya memerlukan waktu yang tidak singkat menumbuhkan rasa tersebut, tapi Indonesia harus tetap optimis dan konsisten.

Promosi ke luar negeri juga bisa memberikan dampak yang baik, antara lain dapat meningkatkan nilai ekspor Indonesia. Promosi yang sebaiknya dilakukan adalah dengan memperkenalkan produk-produk yang berkualitas tinggi.

c. Masyarakat

1. Mencintai Produk Dalam Negeri

Keberhasilan suatu negara tidak hanya didorong oleh pemerintah, tetapi seluruh warga negara dari negara itu. Meskipun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah baik, apabila tidak didukung oleh masyarakat kebijakan tersebut tidak berarti. Oleh karena itu, hendaknya ada sinkronisasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam pemberlakuan pelaksanaan tarif 0% ACFTA ini, para pelaku usaha khawatir masyarakat sebagai konsumen lebih memilih produk luar negeri yang harganya murah. Hal ini dapat mendorong terpuruknya sektor UKM dan industri Indonesia.

Masyarakat Indonesia hendaknya mencintai produk dalam negeri meskipun harganya relatif lebih mahal. Dengan demikian diharapkan sektor UKM dan industri Indonesia dapat mengalami perkembangan yang signifikan sehingga dapat bersaing di pasaran internasional.

J. Dampak Pelaksanaan Tarif 0% ACFTA terhadap Perekonomian Indonesia

Dalam hal ini, terdapat dampak positif dan negatif dari adanya pelaksanaan tarif 0% perjanjian Indonesia dengan ASEAN - ACFTA yang diberlakukan oleh Indonesia.

1. Dampak Negatif

- a. Pertama:** serbuan produk asing terutama dari Cina dapat mengakibatkan kehancuran sektor-sektor ekonomi yang diserbu.
- b. Kedua:** pasar dalam negeri yang diserbu produk asing dengan kualitas dan harga yang sangat bersaing akan mendorong pengusaha dalam negeri berpindah usaha dari produsen di berbagai sektor ekonomi menjadi importir atau pedagang saja.

- c. **Ketiga:** karakter perekonomian dalam negeri akan semakin tidak mandiri dan lemah. Segalanya bergantung pada asing. Jika banyak sektor ekonomi bergantung pada impor, sedangkan sektorsektor vital ekonomi dalam negeri juga sudah dirambah dan dikuasai asing, maka apalagi yang bisa diharapkan dari kekuatan ekonomi Indonesia.
- d. **Keempat:** jika di dalam negeri saja kalah bersaing, bagaimana mungkin produk-produk Indonesia memiliki kemampuan hebat bersaing di pasar ASEAN dan Cina? Walaupun ekspor Indonesia bisa digenjot, yang sangat mungkin berkembang adalah ekspor bahan mentah, bukannya hasil olahan yang memiliki nilai tambah seperti ekspor hasil industri. Pola ini malah sangat digemari oleh Cina yang memang sedang “haus” bahan mentah dan sumber energi untuk menggerakkan ekonominya.
- e. **Kelima:** peranan produksi terutama sektor industri manufaktur dan IKM dalam pasar nasional akan terpakas dan digantikan impor. Dampaknya, ketersediaan lapangan kerja semakin menurun.

Dampak Positif

1. **Pertama:** ACFTA akan membuat peluang kita untuk menarik investasi. Hasil dari investasi tersebut dapat diputar lagi untuk mengeksport barang-barang ke negara yang tidak menjadi peserta ACFTA
2. **Kedua:** dengan adanya ACFTA dapat meningkatkan volume perdagangan. Hal ini di motivasi dengan adanya persaingan ketat antara produsen. Sehingga produsen maupun para importir dapat meningkatkan volume perdagangan yang tidak terlepas dari kualitas sumber yang diproduksi
3. **Ketiga:** ACFTA akan berpengaruh positif pada proyeksi laba BUMN secara agregat. Namun disamping itu faktor laba bersih, prosentase pay out ratio atas laba juga menentukan besarnya dividen atas laba BUMN.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

- a. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.
- b. Dalam membentuk ACFTA, para Kepala Negara Anggota ASEAN dan China telah menandatangani *ASEAN-China Comprehensive Economic Cooperation* pada tanggal 6 November 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Sebagai titik awal proses pembentukan ACFTA para Kepala Negara kedua pihak menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the ASEAN and People's Republic of China di Phnom Penh*, Kamboja pada tanggal 4 November 2002. Protokol perubahan *Framework Agreement* ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2003, di Bali, Indonesia. Protokol perubahan kedua *Framework Agreement* ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2006. Indonesia telah meratifikasi *Framework Agreement ASEAN-China FTA* melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004
- c. Pelaksanaan tarif 0% dilakukan dalam 3 tahapan yaitu Early Harvest Programme (EHP), Normal Track dan Sensitif Track
- d. ACFTA memberikan ancaman terhadap industri menengah dan kecil, karena produk mereka lebih murah dan kualitas yang baik, sehingga kita takut bersaing dengan China. Tetapi ACFTA memberikan peluang kepada kita untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dengan bekerja sama dengan mereka
- e. Pemerintah Indonesia mempersiapkan strategi dalam menghadapi Pelaksanaan Tarif 0% di Indonesia yang merupakan kebijakan kedua belah pihak, Indonesia mempersiapkan 3 strategi yang dibuat pemerintah untuk membantu para Industri dan UKM dalam bersaing dengan China yaitu STRATEGI I: Penguatan Daya Saing Global, STRATEGI II: Pengamanan Pasar Domestik STRATEGI III:

- f. ACFTA menimbulkan dampak Positif dan negatif bagi perekonomian Indonesia. Namun hal ini tidak bisa dipungkiri dampak negatif dari adanya ACFTA mendominasi akan keterpurukan perekonomian Indonesia yang menjadi Bom Bunuh Diri bagi industri negara ini.

B. Saran

- a. Pelaksanaan Kebijakan Indonesia dengan ACFTA membuat kebijakan Penghapusan bea masuk atau tarif menjadi 0% membuat masyarakat pro dan kontra
- b. Pemerintah sepatutnya melakukan langkah antisipatif untuk memberikan kesempatan industri lokal berkembang, peningkatan mutu produk dalam negeri sehingga dapat bersaing dengan produk luar negeri.
- c. UKM (usaha kecil menengah) dan Industri perlu ditingkatkan guna memajukan daya saing produk yang semakin ketat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan keringanan terhadap para wirausahawan dalam memperoleh kredit usaha, Memberikan izin dalam membuka usaha mereka, dan mempromosikan Produk dalam Negeri kepada masyarakat agar mereka tertarik dengan produk dalam negeri.
- d. Pemerintah harus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari produk luar negeri yang mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat, dan pemerintah menseleksi barang-barang produk-produk China masuk ke Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- <http://destyapurwaningtyas.blogspot.com/2010/03/strategi-menghadapi-perdagangan.html> , 20 desember 2011
- <http://finance.detik.com/read/2010/01/02/105146/1270255/4/tarif-perdagangan-asean-0-mulai-berlaku> 15 Februari 2012
- <http://karimahpatryani.wordpress.com/2011/06/05/kebijakan-perdagangan-internasional/> 15 Februari 2012
- <http://map.ugm.ac.id/index.php/component/content/article/11-policyforum/64-acfta-dan-indonesia> 15 Februari 2012
- <http://ninyasmine.wordpress.com/2011/07/19/implikasiacfta/> **20 Desember 2011**
- <http://pabean08.wordpress.com/> 22 Februari 2012
- http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/files/LHP_BHB_2007 15 Februari 2012
- <http://resturahmawati.blogspot.com/2011/04/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html> 15 Februari 2012
- <http://saepudinonline.wordpress.com/2011/03/02/implikasi-asean-%E2%80%93-china-free-trade-area-acfta-terhadap-hukum-investasi-di-indonesia/>. 20desember 2011
- <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/8E17FA47-1493-4B36-91ED-C16248D031F5/21624/AmaliaAW.pdf> 15 Februari 2012
- <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/8E17FA47-1493-4B36-91ED-C16248D031F5/21625/Ibrahim.pdf> 15 Februari 2012
- <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/8E17FA47-1493-4B36-91ED-C16248D031F5/21626/BAWirapati.pdf> 15 Februari 2012
- http://www.smecca.com/File_ACFTA/Bhn_Present_Kementerian_KUKM.pdf 15Februari 2012

Retraubun, Alex, Dr, 2010, *ACFTA, Peluang atau Ancaman*, Tabloid Veritas Dei, vol II, Tahun 1 Juni 2010

W. Poedjiwati, Dyah, 2010, *Strategi Pengamanan Industri dalam Negeri menghadapi ACFTA*. Seminar pada Universitas Gunadharma

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Rivandi
Tempat tanggal lahir : Solok, 18 Juli 1991
Anak ke : 1 (Satu)
Jumlah Bersaudara : 4 (Empat) Bersaudara
Agama : Islam
Universitas : UNIVERSITAS BUNG
HATTA

Fakultas/Jurusan : Ekonomi / Akuntansi
NPM : 0910011311029
Alamat : **Rumah:** Jl. Kapten M. suid Yahya No 22 VI SUKU
Kota Solok

Kost: Jl. Mentawai W3 Ulakkarang Padang

No telp/ HP : 085374442188 / 085766234218

Email : verrary_blue@yahoo.com

Facebook : Verrary_blue@yahoo.com

Prestasi : 1. 10 Besar Karya Tulis Remaja (Kategori Science)
tingkat SMA Se-Sumbar di ITB dengan judul ***“Pohon
Mahoni dapat mengurangi Pemanasan Global di Kota
Solok”***

2. Juara 1 Karya Tulis Islami Tingkat Fakultas Univ.
Bung Hatta dengan judul ***“Generasi Muda
Berintelektual”***